

pi

# KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

Riris Katharina, Evi Maya Savira, Dewi Sendhikasari Dharmaningtias,  
Anin Dhita Kiky Amrynudin, Sidiq Budi Sejati

Editor: Riris Katharina

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor

**Riris Katharina**

# **KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA**

Evi Maya Savira

Riris Katharina

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias

Anin Dhita Kiky Amrynudin

Sidiq Budi Sejati

Publica Indonesia Utama

2022

\*\*\*

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kebijakan Satu Data Indonesia / Evi Maya Savira, Riris Katharina, Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Anin Dhita Kiky Amrynudin, Sidiq Budi Sejati | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2022

xxii + 162 Hlm; 14,8 X 21 cm

**ISBN: 978-623-8232-09-3**

Cetakan Pertama, Desember 2022

**Judul:**

**Kebijakan Satu Data Indonesia**

Penulis : Evi Maya Savira, Riris Katharina,  
Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Anin Dhita Kiky Amrynudin,  
Sidiq Budi Sejati  
Editor : Riris Katharina  
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute  
Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022  
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar  
Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta  
publicaindonesiautama@gmail.com

## KATA PENGANTAR EDITOR

Buku yang diberi judul “Kebijakan Satu Data Indonesia” ini sebagian besar merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti DPR RI pada tahun 2021. Dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan terkait data Covid-19 pada awal pandemi, penelitian itu dilakukan. Penelitian dilakukan di Kota Bekasi dan Kota Tangerang.

Persoalan Satu Data di Indonesia sesungguhnya sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan masih terasa hingga sekarang. Perbedaan data penduduk yang disajikan oleh BPS misalnya dengan data pemilih yang ada di KPU atau bahkan data penduduk di Dirjen Dukcapil sering kali ditemukan. Para peneliti acap kali menemukan persoalan ini di lapangan. Perbedaan data ini tanpa disadari oleh pemerintah telah mengakibatkan menurunnya rasa percaya (*trust*) masyarakat kepada pemerintah, sebagaimana dikemukakan Edelman Trust Barometer. Oleh karena itu, tulisan dalam buku ini merupakan sebuah ikhtiar dari para peneliti untuk memberikan gambaran SDI di lapangan dan pada akhirnya dari hasil analisis mendalam disimpulkan persoalan dan tantangan dalam implementasi SDI. Sebagai akademisi, para peneliti juga berkontribusi memberikan rekomendasi demi perbaikan kebijakan SDI dalam rangka mempercepat tercapainya satu data di Indonesia.

Bagian pertama dari buku ini menjelaskan mengenai apa itu SDI berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, oleh karena itu bagian ini diberi judul “Kebijakan Satu Data di Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi”. Ada banyak istilah teknis yang digunakan dalam tulisan ini. Namun, pada bagian tantangan implementasi SDI kedua penulis Riris Katharina

dan Evi Maya Savira berhasil mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi SDI, antara lain persoalan kelembagaan, SDM, anggaran, rendahnya komitmen pemimpin, dan luasnya skala tata kelola data dan skala substansi data. Berdasarkan tantangan yang diidentifikasi, kedua penulis merekomendasikan beberapa upaya untuk menanggulangi persoalan terkait SDI. Rekomendasi tersebut yaitu melakukan deregulasi peraturan yang menghambat hubungan kelembagaan; memberdayakan SDM administrator dengan memberikan tugas dan fungsi sebagai produsen data; melakukan penataran kerangka anggaran melalui mitra dengan perencanaan di pusat dan daerah; serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya satu data melalui jalur formal dan informal seperti media sosial.

Bagian kedua buku ini ditulis oleh Dewi Sendhikasari Dharmaningtiyas dan diberi judul “Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital di Indonesia”. Tulisan ini menegaskan hubungan yang selaras antara kebijakan SDI sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan SDI diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan *e-government* guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik. Tulisan ini mengemukakan bahwa kebijakan SDI dapat berjalan dengan optimal jika memiliki landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar DPR bersama pemerintah perlu bersama-sama melakukan pembahasan RUU SDI yang saat ini telah disusun di DPR RI. Selain itu, berbagai permasalahan dalam implementasi SDI terutama terkait infrastruktur jaringan, SDM unggul, dan keamanan data wajib diperhatikan agar masyarakat dapat merasakan manfaat data dengan aman tanpa takut datanya akan bocor dan disalahgunakan. Dengan demikian, kebijakan SDI dapat menyediakan data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir guna

mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

Tulisan dengan judul “Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kebijakan Satu Data Indonesia”, ditulis oleh Anin Dhita Kiky Amrynudin, ditempatkan pada bagian ketiga buku ini. Tulisan ini dilatarbelakangi situasi pada saat penanganan pandemi Covid-19, dimana terjadi perbedaan terkait data kasus Covid-19 antar instansi, baik di pusat maupun di daerah. Diikuti dengan tidak validnya data bantuan sosial, dan juga data penerima vaksin. Kondisi ini semakin mendorong adanya kebutuhan akan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, yakni melalui implementasi SDI. Temuan penulis terkait hambatan dalam implementasi SDI di daerah yaitu *data complexity*, kondisi geografis; kapasitas aparatur; persoalan ketiadaan regulasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan integrasi data; infrastruktur penunjang SDI; serta persoalan koordinasi dan rantai komunikasi yang relatif panjang. Menurut penulis, model *collaborative governance* dapat digunakan dalam menerapkan kerja sama dan pengembangan, serta melaksanakan kebijakan SDI yang menghadapi masalah yang kompleks dalam implementasinya. Penulis merekomendasikan agar kolaborasi terkait SDI dilakukan melalui komunikasi yang baik; menumbuhkan kepercayaan antar pemerintah pusat dan daerah; komitmen antara pemerintah pusat dan daerah; pemahaman terkait visi dan misi SDI; sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur; dan merumuskan keberhasilan program secara terukur dan jelas serta melakukan evaluasi.

Tulisan yang ditulis oleh Sidiq Budi Sejati dengan judul “Implementasi Kebijakan Satu Data di Daerah” merupakan tulisan pada bagian keempat buku ini. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh masih adanya perbedaan data yang ditengarai sebagai salah satu penyebab tidak optimalnya

pelaksanaan kebijakan pembangunan di Indonesia. Pemerintah menilai penting untuk melakukan transformasi agar berbagai aplikasi yang menyediakan data dapat terintegrasi sehingga pelaksanaan tugas pemerintah dapat lebih terkoordinasi dan efisien. Sidiq mengidentifikasi bahwa permasalahan SDI dimulai dari tahap proses, produk yang dihasilkan, produsen data, dan pengguna data. Sidiq juga mengungkapkan tantangan dalam implementasi SDI yakni perbaikan tata kelola, kualitas dan kapasitas SDM; pembangunan infrastruktur; *big data* yang masih merupakan angan-angan; minimnya sosialisasi; dan harmonisasi kebijakan dan peraturan. Pada bagian akhir, Sidiq merekomendasikan beberapa strategi untuk mengatasi persoalan dan tantangan SDI yaitu penguatan proses data; peningkatan kualitas produk data; penguatan produsen data agar menggunakan standar, definisi, klasifikasi, satuan, dan asumsi yang sama serta disepakati berdasarkan konsensus bersama; penguatan pengguna data melalui peningkatan akses terhadap data berkualitas; peningkatan penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan dan evaluasi program berdasarkan data berkualitas.

Tidak lupa, Editor mengucapkan terima kasih kepada Evi Maya Savira, peneliti BRIN yang telah menyediakan waktunya untuk menulis bagian prolog dan berkenan menulis bersama-sama pada bagian pertama buku. Pada akhirnya, Editor mengucapkan selamat membaca kepada para pembaca. Semoga buku ini membawa manfaat bagi Indonesia yang lebih baik dan menjadi Indonesia Hebat!

Jakarta, Oktober 2022

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor .....	v
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Diagram .....	xiv
Prolog	
Satu Data Indonesia dan Reformasi Birokrasi .....	xv
<i>Evi Maya Savira</i>	
Daftar Pustaka .....	xx
BAGIAN PERTAMA	
KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA: TANTANGAN DAN REKOMENDASI.....	1
<i>Riris Katharina &amp; Evi Maya Savira</i>	
Pendahuluan .....	1
Kebijakan Satu Data Indonesia .....	6
Implementasi Satu Data Indonesia .....	21
Tantangan Implementasi Satu Data .....	29
Penutup .....	31
Daftar Pustaka .....	32
BAGIAN KEDUA	
KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIGITAL DI INDONESIA .....	35
<i>Dewi Sendhikasari Dharmaningtias</i>	
Pendahuluan .....	35

Kebijakan Publik dan <i>E-government</i> .....	40
Implementasi Program SDI dalam <i>E-government</i> .....	56
Penutup .....	72
Daftar Pustaka .....	73
BAGIAN KETIGA	
RELASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM	
KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA .....	
<i>Anin Dhita Kiky Amrynudin</i>	
Pendahuluan .....	77
Pola Relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam	
Implementasi Kebijakan Satu Data di Indonesia .....	82
Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Satu Data di	
Indonesia .....	97
Implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Kota Bekasi	
dan Kota Tangerang.....	101
Kota Bekasi .....	102
Kota Tangerang .....	104
Penutup .....	106
Daftar Pustaka .....	108
BAGIAN KEEMPAT	
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA DI DAERAH .....	
<i>Sidiq Budi Sejati</i>	
Pendahuluan .....	111
Daerah sebagai “Hulu” Satu Data Indonesia.....	118
Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah..	125
Implementasi Satu Data di Daerah.....	130
Penutup .....	143
Daftar Pustaka .....	148

EPILOG	
TANTANGAN DAN REKOMENDASI BAGI IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA .....	151
<i>Riris Katharina</i>	
Indeks .....	154
Tentang Penulis .....	160

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Muatan Hasil Survey dan Analisis <i>Government at a Glance</i> 2017 dan 2021 .....	xvii
--	------

### **Bagian Pertama**

Tabel 1. Pencapaian Kebijakan SDI 2019 – 2022.....	8
Tabel 2. Lingkup Kerja SDI .....	10
Tabel 3. Struktur Metadata Statistik .....	18
Tabel 4. Contoh Standar Data Spasial .....	19
Tabel 5. Peraturan tentang Katalog Data SDI .....	20
Tabel 6. Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi/Data Induk dalam Implementasi SDI.....	22
Tabel 7. Implementasi Interoperability dan Portal SDI.....	24

### **Bagian Ketiga**

Tabel 1. Peran dan Tugas Penyelenggara SDI Tingkat Pusat dan Daerah.....	88
Tabel 2. Mekanisme Kerja dan Keterhubungan SDI Tingkat Pusat dan Daerah .....	91
Tabel 3. Identifikasi Hambatan dalam Pelaksanaan SDI Pusat dan Daerah .....	99

### **Bagian Keempat**

Tabel 1. Tahapan Perencanaan Penentuan Daftar Data di Daerah.....	129
---	-----

<b>Tabel 2.</b> Pencapaian Indeks Nasional Evaluasi SPBE .....	131
<b>Tabel 3.</b> Jumlah Predikat Evaluasi SPBE 2021 Pemerintah Tingkat Provinsi.....	131
<b>Tabel 4.</b> Jumlah Predikat Evaluasi SPBE 2021 Pemerintah Tingkat Kabupaten.....	133
<b>Tabel 5.</b> Jumlah Predikat Evaluasi SPBE 2021 Pemerintah Tingkat Kota.....	135
<b>Tabel 6.</b> Jumlah Predikat Evaluasi SPBE 2021 pada Pemerintah Daerah.....	136
Tabel 7. Skor EV-DCI pada 157 Kota/Kabupaten 2022 .....	138
<b>Tabel 8.</b> Indeks Literasi Digital Indonesia 2021.....	141
<b>Tabel 9.</b> Jumlah Pengguna Internet di Indonesia .....	142

## DAFTAR GAMBAR

### Bagian Pertama

Gambar 1. <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Indonesia 2045.....	1
Gambar 2. Struktur SDI.....	12
Gambar 3. Harmonisasi Data SDI.....	14
Gambar 4. Laman Depan Portal Satu Data Indonesia .....	16
Gambar 5. Metadata Statistik.....	17
Gambar 6. Maturitas Penyelenggaraan SDI di Pusat .....	26
Gambar 7. Maturitas Penyelenggaraan SDI Tingkat Provinsi ..	27

### Bagian Kedua

Gambar 1. Kebijakan Pembatasan Sosial.....	37
Gambar 2. Kondisi Sekarang dan Kondisi yang Diharapkan SDI di Masa Depan.....	58
Gambar 3. Pijakan Transformasi Penyusunan Kebijakan .....	60
Gambar 4. Struktur Penyelenggara SDI.....	67
Gambar 5. Hubungan Kerja SPBE dan SDI.....	68
Gambar 6. Gambaran Umum Penyelenggaraan SDI .....	70

### Bagian Keempat

Gambar 1. Konsep Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	124
Gambar 2. Proses Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah .....	127

## DAFTAR DIAGRAM

### **Bagian Ketiga**

Diagram 1. Tren Kepuasan terhadap Kerja Pemerintah Pusat Menangani Covid-19 Oktober 2019 - Maret 2022.....	79
Diagram 2. Siklus <i>Collaborative Governance</i> .....	85



## **PROLOG**

# **SATU DATA INDONESIA DAN REFORMASI BIROKRASI**

Evi Maya Savira  
(evim001@brin.go.id)

Buku ini sesungguhnya menjadi bagian dari refleksi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode Pemerintahan Joko Widodo saat ini dan menjadi catatan atas topik menarik yang menjadi keluaran dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang dampaknya bukan saja bagi birokrasi tetapi juga masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu Satu Data Indonesia (SDI).

Berbagai hal yang dibahas dan dikritisi dalam buku ini sudah cukup memadai mengingat berbagai sektor yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2019 tidak luput digambarkan dan dianalisis dalam buku ini. Buku ini telah berhasil menggambarkan mengenai kebijakan SDI itu sendiri, baik dari perspektif kebijakan SDI yang menggambarkan capaian implementasi kebijakan hingga saat ini (2019 - 2022) beserta tantangannya; hubungan SDI dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hubungan SDI dengan pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi SDI; serta implementasi SDI di daerah.

Saya tidak akan mengulang kembali apa yang telah dibahas oleh para penulis di dalam bagian buku ini, saya justru mempersilahkan para pembaca membaca tulisan yang cukup

komprehensif ini. Tulisan disertasi gambar-gambar akan sangat membantu para pembaca memahami SDI, mengingat ada persoalan infrastruktur IT dan berbagai aplikasi yang menjadi bagian penting dari keberhasilan kebijakan SDI. Namun, saya mencoba kali ini menghubungkan antara SDI dengan kebijakan reformasi birokrasi Indonesia yang menurut saya menjadi bagian penting yang tidak tampak dalam berbagai tulisan yang tersaji di buku ini.

Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi *milestone* bagi tatakelola pemerintahan yang modern yang dicirikan dengan akuntabilitas, transparansi, pelibatan multi aktor dalam pembuatan kebijakan serta dimulainya perumusan kebijakan yang berdasarkan bukti (*evidence based policy*), pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional berdasarkan sistem merit, digitalisasi layanan publik secara masif, serta semakin meluasnya tuntutan untuk melakukan inovasi di sektor publik.

Sejak tahun 2014 paradigma inovasi di sektor publik telah diperkenalkan, dimulai oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui laboratorium inovasi yang kemudian menjadi program nasional secara masif di hampir seluruh penjuru negeri, yang kemudian diikuti dengan kontes-kontes inovasi di sektor publik seperti SINOVIK, INAGARA, IGA, maka unsur inovasi juga mulai dimasukkan ke dalam pelaksanaan penilaian program reformasi birokrasi sebagai bagian dari nilai tambah instansi dalam menjalankan program reformasi birokrasi. Kurang lebih sejak tiga sampai empat tahun terakhir inovasi instansi maupun unit kerja menjadi nilai tambah dalam evaluasi reformasi birokrasi maupun LAKIP. Perkembangan SDI di pusat dan daerah (sebagaimana ditulis pada bagian ketiga dan keempat buku ini) dapat dilihat berkembang juga karena peran program nasional dan kontes-kontes inovasi yang diadakan. Walaupun, persoalan lain muncul yakni hadirnya berbagai

aplikasi sebagai bentuk kekeliruan inovasi yang pada akhirnya memboroskan anggaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah, sebagaimana digambarkan pada bagian kesatu buku ini.

Pendekatan reformasi birokrasi yang lebih kekinian terlihat pada periode kedua masa pemerintahan Joko Widodo. Digitalisasi pelayanan publik melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengenalan dan penerapan manajemen talenta, penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta penyederhanaan birokrasi dan juga regulasi, merupakan bukti akan hadirnya pendekatan digital dalam pemerintahan Indonesia.

Sinkronisasi satu data publik pun dalam *platform* SDI sebagai bagian dari SPBE (sebagaimana dijelaskan secara gamblang dalam bagian kedua buku ini) menjadikan jawaban atas keluhan data publik di Indonesia yang selama ini kurang dapat dipercaya kualitasnya. Meskipun hal ini masih dalam proses pembangunan dan pengembangan, namun *platform* SDI telah memberikan standardisasi data publik yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah. Setiap era pemerintahan meletakkan fokus reformasi birokrasi yang berbeda-beda sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dijalankan. Harapan Presiden Joko Widodo terhadap reformasi birokrasi ini paling tidak menyangkut empat hal, yaitu:

1. Birokrasi yang menciptakan hasil;
2. Birokrasi yang *making delivered*;
3. Birokrasi yang berdaya saing;
4. Birokrasi yang sederhana, lincah dan cepat.

Dampak reformasi birokrasi dalam bidang sumber daya manusia aparatur selain menciptakan aparatur yang semakin profesional, namun ada juga dampak ikutan karena *mindset* yang belum siap berubah. Dalam sumber daya manusia

aparatur, beberapa kebijakan yang saat ini sedang dibahas dan akan segera diimplementasikan, tampaknya memberikan angin segar terhadap perbaikan manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti *super apps* aparatur, SPBE, manajemen talenta ASN Nasional, *Corporate University*, dan *electronics wallet* untuk model pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi pegawai.

Pekerjaan berat pemerintahan Joko Widodo saat ini adalah memastikan kebijakan yang dikeluarkannya juga berdampak bagi keberlanjutan pembangunan, termasuk kebijakan SDI. Kebijakan SDI harus dapat mendorong reformasi birokrasi berjalan sesuai *grand design*, bahkan jika diperlukan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaannya, sehingga dapat diubah jika ada yang tidak sesuai.

OECD melalui publikasi *Government at Glance* dapat dijadikan salah satu referensi tentang bagaimana upaya reformasi administrasi atau kinerja administrasi pemerintahan dilakukan dari tahun ke tahun dan substansi apa saja yang harus dilihat sebagai gambaran dari kinerja yang dilakukan pemerintahan yang menyangkut para pemangku kepentingan. Menariknya, laporan *government at a glance* ini disesuaikan dengan situasi pemerintahan di seluruh dunia. Dalam penyusunannya, OECD secara aktif melibatkan para ahli dan praktisi pemerintahan di seluruh dunia, sehingga hasilnya lebih faktual dan menggambarkan kondisi yang terjadi setiap tahunnya. Beberapa muatan yang dianalisis dari *government at a glance* dari tahun sebelum wabah Covid-19 menyandera dunia dan ketika Covid-19 membelenggu semua pemerintahan dunia dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Muatan Hasil Survey dan Analisis**  
***Government at a Glance 2017 dan 2021***

<b>Government at a Glance 2017</b>	<b>Government at a Glance 2021</b>
Making globalization work for all requires effective public governance	Fit for the future: Learning from the Covid-19 crisis to reinforce democratic governance
Government at a glance: a lighthouse for our public services	
Chapter 1: Embracing continues change in government	Chapter 1: Focus – Fit for the future: strengthening governance resilience
Chapter 2: Public finance and economics	Chapter 2: Public Finance and Economics
Chapter 3: Public employment and pay	Chapter 3: Public Employment
Chapter 4: Institutions	Chapter 4: Institutions
Chapter 5: Budgeting practices and procedures	Chapter 5: Budgeting
Chapter 6: Human Resource Management	Chapter 6: Human Resources Management
Chapter 7: Public Sector Integrity	Chapter 7: Regulatory Governance
Chapter 8: Regulatory governance	Chapter 8: Public Procurement
Chapter 9: Public Procurement	Chapter 9: Open Government
Chapter 10: Open government	Chapter 10. Digital Government
Chapter 11 Public sector innovation and digital government	Chapter 11: Governance of infrastructure
Chapter 12: Risk Management and Communication	Chapter 12: Public Sector Integrity
Chapter 13: Core Government Results	Chapter 13: Core Government Results
Chapter 14: Serving Citizen	Chapter 14: Serving citizens

Sumber: (OECD, 2017) dan (OECD, 2022)

Dari Tabel 1 terlihat bahwa fokus reformasi administrasi di negara-negara OECD adalah tergantung pada fokus pemerintahan apa, dan disesuaikan dengan lingkungan strategis. Satu lagi pendekatan reformasi administrasi tidak bersifat *one fits for all*, tergantung kebutuhan dan dalam rangka menjawab tantangan apa. Di Indonesia pendekatan reformasi administrasi melalui program reformasi birokrasi masih menggunakan pendekatan satu untuk semua. Bahkan, masih disibukkan dengan penataan birokrasi, bukan pada substansi perubahan yang lebih strategis. Namun, jika dilihat dari sasaran dan capaian dari reformasi birokrasi Indonesia, dapat dikatakan bahwa kebijakan SDI sejalan dengan perkembangan reformasi birokrasi dunia di tahun 2021, yakni *open government* dan *digital government*.

### **Daftar Pustaka**

- OECD. (2017). *Government at a Glance 2017*. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/gov\\_glance-2017-en](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en)
- OECD. (2022). *Government at a Glance - 2021 edition*. In *OECD*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/1c258f55-en>.

## **EPILOG**

### **TANTANGAN DAN REKOMENDASI BAGI IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA**

Riris Katharina  
(riri008@brin.go.id)

Tulisan dalam buku ini memberikan gambaran kepada para pembaca bahwa perkembangan implementasi Satu Data Indonesia cenderung masih berada pada terkelola batas bawah. Ini artinya masih bernilai cukup. Penilaian ini tentu masih sangat jauh dari harapan Presiden Joko Widodo. Terlebih jika kita menyadari bahwa data saat ini merupakan sebuah aset yang harus dikelola dan dimanfaatkan menjadi sumber daya bernilai tinggi.

Kendala tersebut menjadi tantangan dan sekaligus menandatangani harapan bagi kesuksesan Satu Data Indonesia cenderung berasal dari dalam internal. Kendala utama yang kerap kali muncul dapat dikerucutkan menjadi 3 (tiga), yakni kelembagaan, anggaran, SDM, dan keamanan data. Kendala berupa kelembagaan yang ditengarai terjadi karena regulasi yang saling bertentangan atau tumpang tindih, seharusnya sudah dapat diselesaikan melalui re-regulasi. Presiden Joko Widodo sudah menegaskan dalam arahannya agar seluruh regulasi yang dibutuhkan diselesaikan segera. Untuk dapat menyelesaikannya tentu tidak perlu menunggu lahirnya Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Perubahan regulasi dapat dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Untuk dapat menginventarisir apa saja regulasi yang

saling bertentangan atau tumpang tindih, setiap *stakeholder* yang ada di dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI harus duduk bersama. Presiden dalam hal menganggap hal ini penting, boleh juga mengambil inisiatif untuk mendudukkan seluruh *stakeholder* tersebut.

Pesoalan lain, terkait anggaran merupakan persoalan klasik, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah anggaran. Persoalan anggaran dalam situasi ekonomi global yang memasuki masa krisis tentu harus direspons dengan cara-cara yang bijak. *Refocusing* anggaran merupakan langkah yang penting dan strategis. Untuk dapat melakukan *refocusing*, tentunya setiap *stakeholder* mau berkorban dengan menghitung kembali anggaran yang tersedia, dan mulai mengarahkan anggaran yang ada untuk data. Beberapa kegiatan dalam K/L/D yang bisa dilakukan penghematan, segera lakukan penghematan. Jenis kegiatan yang dapat dihemat misalnya pengadaan seragam, makan minum, atau mengurangi kegiatan perjalanan dinas.

Persoalan kuantitas dan kualitas/kompetensi sumber daya manusia aparatur sebagai produsen data memang masih menjadi persoalan. Merekrut SDM aparatur tentu menjadi beban bagi keuangan negara untuk jangka panjang. Oleh karena itu, terobosan yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan tenaga baru melalui kegiatan merdeka belajar kampus merdeka yang digaung-gaungkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Terakhir, persoalan keamanan data yang menjadi isu krusial akhir-akhir ini. Persoalan ini dapat diatasi melalui kerja sama. Sebab, menjaga kerahasiaan data tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Demikian pula keamanan data sangat bergantung kepada anggaran, terkait pengadaan alat yang berkenaan dengan proteksi data.

Pada akhirnya, ketika seluruh pihak telah menyadari pentingnya Satu Data Indonesia untuk mendukung berbagai aktivitas, baik pemerintah maupun masyarakat, diharapkan kerjasama akan dapat dibangun. Dengan kesadaran mendukung Satu Data Indonesia dari berbagai pihak, diharapkan Satu Data Indonesia akan dapat mencapai cita-citanya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

## INDEKS

### A

adaptif 86  
administrasi xviii, xx, 13, 15, 21, 24, 45, 47, 49, 53, 103, 120, 131, 141,  
144, 145, 162  
AI Award 101  
aksi 5, 65, 99, 104, 116  
animo 114, 115  
APBD 78  
APBN 78, 141  
aplikasi viii, xvi, xvii, 3, 4, 5, 13, 23, 29, 30, 31, 33, 38, 46, 48, 51, 52, 59,  
71, 97, 101, 103, 104, 107, 108, 140, 141, 144, 146, 149  
arsitektur 15, 16, 20, 55, 93, 108

### B

Bappenas 1, 10, 12, 14, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 63, 65, 73, 82, 84,  
88, 90, 91, 93, 94, 110, 114, 126, 148  
Beginner 100  
Bekasi v, x, 101, 102, 103, 104, 138  
Big Data 39, 65, 73, 101, 119, 120  
BRIN viii, 29, 162

### C

Choi & Robertson 83  
Cloud 30, 33, 39, 73, 146  
Covid-19 i, iii, iv, v, vii, xiv, xviii, xix, 35, 36, 38, 73, 77, 79, 80, 81, 101,  
104, 105, 106, 109, 110, 126, 140, 143, 147, 161

### D

Daerah vii, x, xi, xii, xiii, 4, 11, 27, 50, 72, 80, 82, 88, 89, 90, 91, 93, 94,  
97, 99, 102, 110, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129,  
130, 136, 138, 148, 149, 150, 161

Data v, vi, vii, ix, x, xi, xiii, xv, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 84, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 153

Data Complexety 97

Data Terpadu Sosial (DTKS) 81

Digital vi, xii, xix, 3, 32, 39, 40, 68, 73, 75, 97, 109, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 162

Diklat 4

## E

Edelman Global 6

e-Government ix, 96, 108

Ekonomi i, iii, iv, 77, 79, 97, 108, 109, 144

Evaluasi xii, 4, 33, 53, 54, 55, 74, 126, 130, 131, 133, 135, 136, 148, 149

## F

Fasyankes 22, 25, 71

Forum 8, 10, 11, 13, 22, 24, 71, 91, 92, 93, 94, 95, 104, 112, 126, 127, 129

Forum SDI 8, 10, 11, 13, 71, 91, 93, 94, 95, 127, 129

## G

Geografis 19, 97

Geoportal 24, 25

Good governance 123

Government to Government (G2G) 47, 96

Gray 83

Gugus Tugas Tematik 11, 13

## I

IFMIS 8, 23, 71

Implementasi vii, ix, x, xi, 4, 21, 22, 24, 29, 33, 39, 42, 44, 45, 51, 56, 57, 73, 74, 75, 82, 97, 99, 101, 109, 130, 161

Indonesia i, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xii, xiii, xv, xvi, xvii, xx, 1, 5, 6, 7, 9, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74,

75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100,  
101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117,  
118, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 144,  
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 161, 162  
Informasi xiii, 3, 8, 19, 20, 25, 27, 47, 52, 53, 63, 65, 66, 74, 75, 82, 88,  
89, 96, 109, 112, 122, 124, 126, 127, 148  
Infrastruktur 97, 107, 109, 138  
Innovative Government Award (IGA) 102  
Integrasi 24, 29, 34, 96, 98, 109, 110, 126  
Internet xii, 39, 140, 142, 149  
Interoperabilitas 10, 22, 62, 71  
Interoperability xi, 24  
Investasi 141

## **J**

Jaringan 25, 89, 128  
Joko Widodo xv, xvii, xviii, 2, 39, 56, 77, 78, 112, 114, 143, 151

## **K**

Katalog iv, xi, 10, 20, 141  
Kebijakan i, iii, iv, v, vi, vii, ix, x, xi, xiii, xviii, 1, 3, 4, 6, 8, 31, 36, 37, 40,  
41, 42, 50, 56, 59, 60, 61, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84,  
97, 101, 106, 109, 110, 111, 118, 126, 141, 148, 161  
Kependudukan 22, 24, 112  
Kepercayaan 6, 18, 86  
Keterhubungan xi, 91, 93  
Kewilayahan 22, 71  
Klasifikasi 23, 25  
Kode xi, 19, 22, 23, 24, 71, 81, 93  
Kolaborasi 87  
Konten 10

## **L**

Literasi Digital xii, 141, 142, 143, 149, 150  
LSM 6, 15

## **M**

Maturitas xiii, 26, 27

Metadata xi, xiii, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 71  
Metodologi 18  
Monitoring 24, 101

## **N**

New All Record (NAR) 105  
NIK 21, 22, 24, 71, 81, 108  
non-disclosure agreement 98

## **O**

OECD xviii, xix, xx, 6, 33, 47, 64, 65, 74, 162  
on desk 101  
on site 101  
Open Government xix, 5, 33, 57, 64, 65, 74, 75  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 78

## **P**

Pandemi i, iii, iv, 35, 77, 81, 109  
Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 80  
Pelayanan Publik 161, 162  
Pembina 82, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 99, 104, 128  
Pemerintah vii, viii, x, xii, xiv, 2, 3, 4, 24, 25, 33, 36, 39, 47, 50, 65, 66,  
73, 75, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 89, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110,  
120, 121, 123, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 141, 144, 146,  
147, 148, 149, 161  
Pemerintahan vi, xiii, xv, 2, 4, 6, 27, 29, 33, 39, 40, 51, 54, 55, 74, 75, 97,  
110, 118, 122, 124, 125, 130, 148, 161, 162  
Pemerintahan Digital vi, 40, 75, 162  
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 79  
Pengarah 8, 9, 11, 21, 22, 24, 71, 82, 88, 92, 93, 94, 126  
Perencanaan xi, 1, 63, 65, 82, 93, 98, 99, 102, 114, 122, 126, 129, 148  
Perpres v, xv, 1, 2, 3, 7, 9, 15, 20, 28, 54, 61, 68, 69, 82, 99, 102, 112, 152  
Platform 8  
Portal xi, xiii, 8, 9, 11, 16, 24, 25, 56, 64, 71, 81, 95, 100, 110  
PPKM 35  
Primary Care/P-Care 104  
Prosedur 19, 126, 148  
PSBB 35, 38

Publik ix, 6, 11, 33, 40, 41, 42, 75, 80, 96, 97, 101, 108, 109, 110, 161, 162  
Pusat Data Nasional 24, 25, 30, 33

## **R**

Ready 100  
Referensi xi, 10, 18, 22, 23, 62, 71, 81, 93  
Regulasi 8, 27, 29, 34, 98, 110, 138  
Rekomendasi v, vi, ix, 81, 109  
Relasi vii, x, 82  
Rencana 5, 33, 65, 73, 93, 94, 113, 119  
RKP 28  
Roadmap xiii, 1, 2  
RPJMN 28

## **S**

Satu Data Indonesia v, vi, vii, ix, x, xiii, xv, 1, 6, 7, 9, 16, 19, 21, 29, 32,  
33, 34, 40, 56, 57, 59, 62, 63, 66, 69, 73, 74, 75, 81, 82, 84, 90, 92,  
93, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 117,  
118, 125, 126, 127, 129, 144, 146, 148, 151, 153  
SDGs 28  
Sensus 102, 103, 111  
Siklus xiv, 85  
SIPD 27, 123, 125  
Spasial xi, 8, 19, 22, 23, 71  
Statistik xi, xiii, 8, 16, 17, 18, 22, 23, 36, 63, 65, 71, 77, 82, 88, 95, 108,  
111, 113, 120, 121, 126, 148, 149

## **T**

Tangerang v, x, 101, 102, 104, 105, 107  
Tata Kelola 23  
Teknologi 27, 46, 47, 52, 53, 63, 74, 75, 96, 101, 109, 110, 152  
Transformasi xiii, 3, 32, 39, 40, 60, 64, 68, 97, 109  
Transparansi 51, 74, 96, 108

## **V**

Vaksin 81, 108  
Validasi 10  
Variabel 18

Visi 1, 113

## **W**

Walidata 26, 72, 82, 90, 92, 93, 94, 95, 128, 129

Well-Prepared 100

Wilkerstat 22, 24, 71

## TENTANG PENULIS

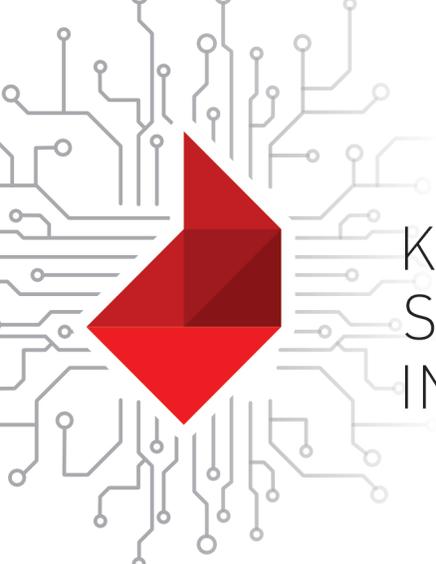
**Anin Dhita Kiky Amrynudin.** Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Administrasi Publik, Universitas Diponegoro pada tahun 2013 dan pendidikan S2 Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: “Upaya Peningkatan Indeks *Ease of Doing Business (EODB)* Melalui Penataan Deregulasi Kebijakan” (2021), “Potensi Politisasi dalam Pilkada di Masa Pandemic Covid-19” (2020), “Problematika *Online Single Submission (OSS)* dalam Mendukung *Ease of Doing Business (EODB)* di Indonesia” (2019), “Netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2019” (2019).

**Dewi Sendhikasari Dharmaningtias.** Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, STPMD “APMD” Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Muda pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: “Tenaga Honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di era 4.0” (2019), “Implementasi Pelayanan Publik di Daerah: Mal Pelayanan Publik dan Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi” (2020), dan “Kebijakan Manajemen PPPK: Penghapusan Status Tenaga Honorer” (2021).

**Evi Maya Savira.** Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Administrasi Negara di Universitas Jenderal Soedirman (2001), dan *Master of Public Policy* pada *Korea Development Institute School of Public Policy and Management (KDIS School)* pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dimana sebelumnya merupakan peneliti di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta. Sejak 2017 aktif dengan kelompok *kerja Network School of Governance (NSG) OECD* Paris untuk menghasilkan naskah kebijakan dan publikasi terkait dengan manajemen sektor publik, manajemen sumber daya manusia sektor publik, *digital government, open government* dan tentang studi perbandingan tatakelola Pemerintahan di negara-negara OECD dan mitra kerja. Beberapa publikasi yang dihasilkan diantaranya adalah mengenai perbandingan reformasi administrasi di Indonesia dan Korea, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Tatakelola Sektor Publik, dan Inovasi Sektor Publik.

**Riris Katharina.** Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996), S2 Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia (2004), dan S3 di Program Doktorat Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia tahun 2017. Menjadi peneliti di DPR sejak tahun 1997. Menjadi Peneliti BRIN sejak 2022. Jabatan saat ini adalah Peneliti Utama dengan kepakaran Birokrasi dan Politik. Saat ini aktif dalam organisasi Perhimpunan Periset Indonesia (PPI). Beberapa karya yang telah diterbitkan di antaranya Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia (ed.), Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2020; Reformasi Birokrasi Indonesia dan Revolusi Industri 4.0 (ed.), Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2019; dan Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2018; Dapat dihubungi di: [ririsk@yahoo.com](mailto:ririsk@yahoo.com); riri008@brin.go.id.

**Sidiq Budi Sejati.** Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Universitas Jayabaya, Jakarta (2011) dan pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Aparatur dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta (2015). Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan antara lain: “Penguatan Kompetensi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)” (2019), “Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemilu menjelang Pilkada Serentak 2020” (2020), “Penguatan Pengawasan Birokrasi di Indonesia” (2021).



# KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

Buku yang diberi judul “*Kebijakan Satu Data Indonesia*” ini sebagian besar merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti DPR RI pada tahun 2021. Dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan terkait data Covid-19 pada awal pandemi. Tulisan dalam buku ini memberikan gambaran kepada para pembaca bahwa perkembangan implementasi Satu Data Indonesia cenderung masih berada pada terkelola batas bawah. Ini artinya masih bernilai cukup. Penilaian ini tentu masih sangat jauh dari harapan Presiden Joko Widodo. Terlebih jika kita menyadari bahwa data saat ini merupakan sebuah aset yang harus dikelola dan dimanfaatkan menjadi sumber daya bernilai tinggi. Buku ini memberikan gambaran persoalan seputar implementasi Satu Data Indonesia dan tak lupa menyampaikan berbagai rekomendasi bernas bagi para pengambil keputusan.



 [publicabooks.ascasrya.or.id](http://publicabooks.ascasrya.or.id)  
 [publicainstitute@gmail.com](mailto:publicainstitute@gmail.com)  
 [publicainstitute\\_jakarta](https://www.instagram.com/publicainstitute_jakarta)  
 Penerbit Publica Institute Jakarta

ILMU SOSIAL

ISBN 978-623-8232-09-3



9 786238 232413